

### **BAB III**

#### **HASIL PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Sistem Perkaderan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten**

Pada umumnya Sistem perkaderan merupakan sebuah mekanisme yang selalu dilakukan secara terstruktur dan bertahap dengan memiliki arah dan tujuan yang jelas serta memiliki pokok-pokok pedoman yang baku. Tujuan dari diadakannya sistem perkaderan tentunya dapat memberikan hasil baik dan tolak ukur dalam partai politik yang akan memiliki regenerasi penerus dalam memperjuangkan cita-cita partai. Satu hal yang penting dalam sebuah perkaderan yakni manusia yang menggerakkan dan menjalankan organisasi tersebut. Dalam pengertian ini, perkaderan dalam organisasi partai politik tak dapat dilakukan karena manusia adalah objek yang harus ada. Jadi dapat diartikan bahwa sebuah pengkaderaan adalah cara untuk menyiapkan SDM-nya agar menjadi seorang pemimpin yang dapat membangun peran serta fungsi organisasi secara lebih bagus dan siap bekerja secara maksimal demi tercapainya tujuan partai.

Oleh karena itu pelaksanaan pengkaderan tentu sangat dibutuhkan pada setiap partai politik. Proses tersebut dilakukan untuk menghimpun basis massa pada partai politik. Hal ini dikarenakan oleh kondisi partai politik yang berusaha untuk memiliki kader-kader yang militan dan berkualitas. Program pengkaderan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dilakukan dalam suatu formulasi yang sistematis, terstruktur, terpadu dan saling berkesinambungan. Dengan tujuan, sasaran, materi, kurikulum, evaluasi dan refleksi, serta rencana tindak lanjut yang jelas, terarah dan memadai dalam setiap tahapan jenjang pengkaderan. Dampak

yang ingin dihasilkan dari suatu tahap atau jenjang perkaderan tentu menjadi suatu modal dasar yang sangat penting bagi suatu organisasi. Dalam setiap perkaderan yang terpola dan memiliki arah pedoman yang jelas, maka tak dapat dielakkan akan tercipta kualitas atau kemampuan para kader yang terasah dan siap untuk mengemban tugas yang di berikan oleh partai politik.

### **1. Bentuk pengkaderan dalam partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Pada dasarnya, setiap bentuk pengkaderan dalam sebuah partai politik mempunyai tujuan untuk mendidik dan menciptakan kader-kadernya agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang mumpuni. Sehingga para kader ini siap di letakkan di mana saja oleh partainya. Yang di maksud dengan kader parpol adalah seorang yang telah menyetujui dan meyakini kebenaran suatu tujuan dari suatu kelompok atau jama'ah tertentu, kemudian secara terus-menerus dan setia turut berjuang dalam proses pencapaian tujuan yang telah disetujui dan diyakini itu (Bambang Wahyudi, 2002:9). Jadi dapat disebutkan bahwa kader parpol yaitu sekelompok warga Negara yang dilatih dalam suatu pendidikan kader dalam organisasi partai politik agar dapat menjadi kekuatan bagi parpol untuk dapat mencapai tujuan paarpol tersebut.

Seorang kader harus memiliki kemampuan yang dapat mendorong terjadinya perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kinerja dalam organisasi/partai serta sekaligus dapat berfungsi sebagai penggerak, pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan partai dan posisi kader sebagai anggota masyarakat yang berusaha turut serta dalam kehidupan masyarakat dan berperan

sebagai anggota masyarakat yang proaktif. Untuk menciptakan hal seperti itu dibutuhkan sebuah bentuk system pengkaderan yang terpola dan mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Dalam pelaksanaan pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, terdapat satu program dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yang bisa di kategorikan sebagai program pengkaderan politik. Program tersebut di ketahui dari hasil wawancara penulis dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Program pengkaderan tersebut adalah program sekolah partai.

a. Program sekolah partai

Program sekolah partai merupakan sebuah program yang di bentuk untuk dapat memberikan pemahaman berupa pemberian kuliah umum kepada setiap kader. Kuliah umum tentunya sangat dibutuhkan kepada setiap kader untuk dapat memperluas wawasannya tentang berbagai macam pengetahuan. Sekolah partai merupakan program PDI Perjuangan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada kader partai. Secara definisi sekolah partai diartikan sebagai suatu institusi yang dipersiapkan untuk menyelenggarakan pendidikan terencana, sistematis, terus-menerus, berjenjang, terukur dan baku, kepada kader PDI Perjuangan dan atau mereka yang langsung atau tidak langsung akan menjadi kader partai dan atau pihak yang akan memberikan dukungan kepada partai, dengan tata kelola pendidikan kader, yang mempertemukan tradisi kepartaian dan tradisi keilmuan. Konsep tersebut menegaskan bahwa sekolah partai akan mengembangkan system pengkaderan,

yang memenuhi standar kependidikan dan keilmuan, dan juga kaidah kepartaian.

Pada tingkat tertentu, sekolah partai adalah model pengkaderan yang menjadi bagian dari praksis pengorganisasian, namun pada tingkat pusat, sekolah partai akan dilengkapi dengan bangunan fisik yang permanen dan dengan tata kelola persekolahan yang sesuai dengan standar dunia pendidikan. Dalam mendirikan sekolah partai ini ada tiga alasan dasar yang dapat diajukan terkait urgensi pengkaderan sekolah partai, yaitu :

- 1) Berlawanan dengan kritik terhadap dunia persekolahan, partai justru membutuhkan suatu system pengkaderan yang tertata, sistematis, berjenjang, dan terukur. Sekolah partai bertekad membangun suatu system pendidikan yang progresif, melalui format persekolahan dengan tata kelola yang memenuhi prinsip-prinsip keilmuan dan kepartaian. Tekad ini sekaligus sebagai bentuk perlawanan atas deparpolisasi yang demikian hebat, sebab akibat dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan kader untuk meningkatkan kualitas kader partai. Sekolah partai dalam batas tertentu ingin menjawab tantangan bahwa partai sesungguhnya memiliki kemauan dan kemampuan untuk mempersiapkan kader bangsa. Melalui sekolah partai, PDI Perjuangan memiliki cita-cita memberikan sumbangan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan berkepribadian Indonesia.

- 2) Selam ini partai di kenal atau tercitrakan sebagi pihak yang anti ilmu pengetahuan, doktrin dan mengabaikan ilmu dalam pengembangan kemasyarakatan melalui jalur partai. Singkat kata, partai politik di pandang tidak memiliki tradisi keilmuan. Dengan sekolah partai, PDI Perjuangan ingin membangun tradisi baru, yakni tradisi yang mempertemukan antara tradisi kepartaian dan tradisi keilmuan. Dihakn dimasa depan, kerja-kerja politik partai akan senantiasa dilandasi dengan riset ilmiah dan dengan indikator yang jelas terukur.
- 3) PDI Perjuangan adalah partai wong cilik. Sebutan ini, bukan saja merupakan cerminan dari pemihakan partai, melainkan juga secara riil, partai mendapatkan dukungan dari mereka yang ada di lapis bagian bawah struktur sosial. Melalui sekolah partai ini, PDI Perjuangan dapat menjadi bagian dari arena pembelajaran, yang mana pengalaman partai bekerja di tengah rakyat dapat menjadi bahan kajian yang menjadi sumber pengetahuan. PDI Perjuangan dengan sekolah partai bertekad memproduksi pengetahuan yang relevan dan dapat menjawab masalah-masalah rakyat, sekaligus menjadi rumah pembelajaran bersama untuk mencapai tujuan bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah partai, sesungguhnya tidak sekedar memenuhi kebutuhan (internal) partai, akan tetapi juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rakyat, baik dalam kerangka ideologi, budaya dan keteknikan. Pada akhirnya,

dengan kerjasama dari perguruan tinggi nasional, sekolah partai sekolah partai akan mengembangkan keahlian keteknikan, seperti bidang pertanian dan bidang lain, yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dalam konteks kepartaian, ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari sekolah partai, yaitu :

- 1) Membangun fondasi yang kokoh bagi “system kaderisasi partai yang modern”, antara lain dengan sistem promosi kader yang memiliki dasar-dasar obyektif yang dapat dipertanggung jawabkan, baik kedalam maupun ke luar.
- 2) Memastikan bahwa partai benar-benar dapat menjadi rahim bagi lahirnya kader-kader bangsa yang berkemampuan tinggi, berbudi luhur dan berkarakter.
- 3) Menjadikan partai sebagai salah satu ilmu pengetahuan, baik ilmu kepartaian, kemasyarakatan, ilmu kenegaraan, ilmu pendidikan, yang nantinya di kemudian hari, dalam ilmu keteknikan, serta pengetahuan lain dapat menjawab tantangan rakyat, bangsa dan Negara.

Menurut Agus Harianto selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, sekolah partai ini bertujuan untuk menertibkan kader-kader PDI Perjuangan dalam proses berjuang untuk masyarakat. Beliau menuturkan bahwa :

“sekolah partai itu sebenarnya mempunyai sasaran yang jelas, nantinya pembagiannya jelas, siapa yang berkeinginan untuk menjadi calon structural, siapa yang berkeinginan menjadi calon legislatif, siapa-siapa lagi yang berkeinginan mencalonkan diri pada saat pemilihan kepala

daerah. Jadi sudah dipetakan seperti itu dengan digodok dalam sekolah pengkaderan politik itu tadi. Sehingga tidak ada saling benturan lagi. Yang sudah dilegislatifkan pengen jadi kepala daerah, kepala daerah pengen jadi legislatif. Kemudian anggota legislatif jadi di struktural. Ini kan acak-acakan dan tidak tertata (wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 16 november 2016)”.

Sekolah partai di Kabupaten Klaten ada dan pernah berjalan. Dimana menurut Sutarjo, pelaksanaan sekolah partai di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten mengacu pada DPP PDI Perjuangan pusat (Jakarta) dan Bekerja sama dengan personil-personil atau dosen dari beberapa universitas seperti Universitas Gajah Mada dan UII Yogyakarta untuk pemberian materi seperti materi tentang Ideologi Pancasila 1 Juni 1945, 4 pilar kebangsaan dan pemilihan umum. Menurut beliau pemilihan tersebut dilakukan karena beberapa dosen dari universitas yang disebutkan diatas di pandang baik untuk melakukan proses pendidikan, khususnya pendidikan politik (wawancara dengan wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 14 November 2016).

Dari kondisi tersebut, penulis menganalisis bahwa pelaksanaan sekolah partai yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten di Kabupaten Klaten tetap bekerjasama dengan DPP PDI perjuangan yang ada di Jakarta tapi pelaksanaannya tetap pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Karena sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, Kabupaten Klaten ini syarat objektifnya memenuhi karena dianggap mampu maka akhirnya Kabupaten Klaten dapat Menyelenggarakan sekolah partai. Hal ini juga diakui oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dalam

wawancara yang dilakukan di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengungkapkan bahwa :

“pada prosesnya yang telah terealisasi di Kabupaten Klaten pada akhir bulan januari sampe awal february tahun 2012 yang lalu. Kurang lebih 20 hari pelaksanaannya bertempat di aula kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dan biasa pesertanya bukan hanya kader-kader dari wilayah yang ada di Kabupaten klaten saja, tapi seluruh Indonesia, itu berangkat karena Klaten adalah cabang pelopor. Yang diberi undangan. Setelah itu, kemudian juga meminta para akademisi untuk memberikan pelatihan sekolah partai tersebut (Wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 16 november 2016 ).”

Jadi, dari pemaparan yang disampaikan oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tersebut dapat di analisis jika sekolah partai yang diusung oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten sebagai sarana pengkaderan politik bisa disebut sebagai media proses pengkaderan dan pembelajaran politik yang matang. Karena penyelenggaraan dari sekolah partai tersebut telah dilaksanakan tepatnya di Kabupaten Klaten tahun 2012 akhir bulan januari sampe awal February (kurang lebih 20 hari) dengan pemberian materi mengenai Ideologi Pancasila 1 Juni 1945, 4 pilar kebangsaan dan pemilihan umum yang bertempat di aula kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Kemudian jika dilihat dari sasaran sekolah partai tersebut, penulis berpendapat bahwa sekolah partai yang diandalkan sebagai sarana pengkaderan politik bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten juga mampu memberikan peningkatan kinerja bagi kader-kadernya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sasaran dari sekolah partai tentunya ialah untuk meningkatkan kader dalam hal pementapan dalam berorganisasi, berprogram dan peningkatan SDM. Yang



mengikuti sekolah partai adalah semua kader PDI Perjuangan yang diberi undangan. Oleh karena itu pelaksanaan sekolah partai yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten penulis menyimpulkan sesuai apa yang diamati telah berjalan dengan efektif dan keluaran (output) hasilnya sangat baik.

b. Rekrutmen anggota

Dalam suatu organisasi hal yang harus ada ialah tersedianya sumber daya manusianya atau anggota dari organisasi itu, karena dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, organisasi itu akan lebih mudah untuk digerakan dan melakukan aktifitas-aktifitas kegiatannya. Begitu pun dalam sebuah partai politik, yang menurut Miriam budiarjo (2008:403-404) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Partai politik secara umum melakukan proses rekrutmen dilakukan dengan cara terbuka maupun tertutup. Kedua cara ini memiliki kekurangan dan kelebihanannya secara masing-masing. Yang terpenting adalah proses rekrutmen yang dilakukan harus melalui proses yang sesuai dengan kaidah yang ada pada partai politik tersebut. Fungsi rekrutmen yang ada pada partai politik ini diharapkan membuat partai politik mendapatkan figur-figur dan menyiapkan figur tersebut menjadi kader yang potensial di masa depan, untuk

mendapatkan figur terbaik tersebut tentu partai politik harus menyeleksi dengan ketat dalam proses kaderisasinya dengan proses ketat itu akan didapatkan kader potensial yang nantinya disisipkan untuk dipilih masyarakat agar menjadi pejabat politik kelak.

Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, terdapat berbagai cara atau sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen. Cara atau sistem rekrutmen seseorang tidak bisa digeneralisir, karena setiap orang punya pengalaman atau cerita masing-masing bagaimana mereka tertarik pada suatu partai politik, sampai akhirnya menjadi kader partai, berikut wawancara penulis dengan Hj. Kadarwati, SH, MH selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengungkapkan bahwa :

“persyaratannya itu tidak ada, yang mau jadi anggota itu tidak harus, pendekatannya itu tadi banyak, istilahnya luwes, kalo mencari kader atau anggota itu kan bisa dengan pendekatan hoby, bisa pendekatan dengan kesenangan, juga bisa dengan pendekatan kekerabatan artinya tidak ada model baku, lah setelah jadi anggota itu baru kita olah. Yang penting mengisi formulir karena kehendak sendiri, dia memang mau masuk ke partai, setelah itu baru kita buat kartu tanda anggota (KTA), (wawancara dengan wakil ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen, 03 Desember 2016 )”

Jadi, dari pemaparan yang disampaikan oleh wakil ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tersebut dapat dianalisis bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dalam hal rekrutmen anggota sangat terbuka bagi siapapun, banyak menggunakan pendekatan-pendekatan dan sangat dimudahkan menjadi

anggota partai dan tak ada paksaan karena pengisian formulir sesuai kemauan sendiri ingin menjadi anggota partai dan di buat kartu tanda anggotanya (KTA). Hal ini mengisyaratkan bahwa administrasi perlu dilakukan untuk menertibkan proses rekrutmen di dalam internal PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.

Selain itu, di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten juga dalam rekrutmen politik untuk caleg non kader yang berasal dari tokoh masyarakat tidak ingin dicalonkan sebab lebih menginginkan calagnya dari kader partai. Berikut wawancara penulis dengan Sutarjo selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengungkapkan bahwa :

“sebetulnya secara umum, PDI Perjuangan itu, mengharapkan kadernya itu, calegnya dari kader partai, tidak menginginkan kader di luar partai (wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 14 November 2016)”

Di dalam DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten terdapat tiga cara dalam sistem rekrutmen politik yang sering digunakan yaitu :

1) Sistem patronik (patronage system)

Sistem patronik dikenal sebagai kawan atau sistem kerabat, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, dimana dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan baik didalam bidang pemerintahan maupun politik dengan pertimbangan yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili dan juga karena asal daerah yang sama. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar

perjuangan politik karena memiliki satu aliran politik, ideologi, dan keyakinan yang sama. Berikut wawancara penulis dengan Agus Demang selaku kader/anggota PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengungkapkan bahwa :

“saya tertarik dengan partai PDI Perjuangan atas dasar faktor lingkungan. Sebab melihat kondisi dulu, pada waktu itu teman, masyarakat khususnya daerah klaten banyak yang turut serta bergabung dengan PDI Perjuangan, begitu pun saya diajak oleh sahabat saya untuk bergabung di PDI Perjuangan (wawancara dengan kader/anggota PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 6 Desember 2016)”

Jadi, dari pemaparan yang disampaikan oleh kader/anggota PDI Perjuangan tersebut dapat dianalisis bahwa lingkungan memang menjadi salah satu pengaruh yang besar untuk mempengaruhi seseorang pada suatu hal, yang tidak menutup kemungkinan juga ketertarikan pada partai politik. Intensitas waktu yang banyak, dan ikatan pertemuan sering menjadi awal atau permulaan seseorang dari seseorang menjadi kelompok tertentu.

## 2) Sistem merita (Merit system)

Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Yang dimaksud dengan objektif tersebut pada umumnya tolak ukur yang digunakan adalah ijazah pendidikan, berikut wawancara penulis dengan Andi Purnomo, SH selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengatakan bahwa :

“PDI Perjuangan sendiri dalam hal penempatan seseorang, dilihat dari kapabilitas dalam proses pengkaderannya. Tak hanya itu, PDI

Perjuangan juga mempertimbangkan keahlian dan latar belakang pendidikannya (wawancara dengan Andi Purnomo, SH selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 8 Desember 2016)”

Jadi, dari pemaparan yang disampaikan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tersebut dapat dianalisis bahwa pemberian kedudukan seseorang dalam struktur kepengurus PDI Perjuangan tentunya harus telah melalui proses tahapan pengkaderan yang ada dan tingkatan pendidikan secara formal yang pernah ditempuh.

### 3) Sistem Karir (career system)

Sistem ini menjelaskan pengertian tentang suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha dan tindakan yang dilakukannya secara dini dalam kehidupan baik dunia kerja maupun dunia politik. Seperti halnya pada pencalonan bupati dan wakil bupati di kabupaten klaten tahun 2015 lalu dimana calon yang di usung oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten merupakan kader Partai yang pernah berproses membangun karir dalam partai politik. Berikut wawancara penulis dengan Hj. Kadarwati, SH, MH selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengatakan bahwa :

“kalo Ibu Hartini itu dulu pernah jadi wakil bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, pernah jadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, pernah jadi struktural pasti hebat, kalo Ibu Mulyani di partai belum ada artinya apa bahwa faktor penentunya tetap pada bupatinya (wawancara dengan wakil ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen, 03 Desember 2016 )”

Jadi, dari pemaparan yang disampaikan oleh wakil ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tersebut dapat dianalisis bahwa penentuan seseorang untuk dapat menduduki suatu jabatan tertinggi tentunya dilihat dari seberapa jauh proses atau pengalaman yang pernah dilaluinya maka dapat dikatakan telah berkompeten dan pastinya hebat dalam menjalankan pemerintahan.

Dari ketiga sistem rekrutmen yang dijelaskan diatas untuk dokumentasi data pada perekrutan kader untuk setiap periodenya dari tahun ke tahun di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten kurang diperhatikan dan tidak terdokumen dengan baik datanya. Jadi, tidak ada jumlah berapa angka yang pasti dari ketiga sistem rekrutmen tersebut.

Namun dari ketiga sistem rekrutmen politik menurut penulis seperti apa yang diamati di lapangan, sistem patroniklah (kekerabatan/berkawan) yang lebih banyak dapat menjaring anggota kader untuk bergabung ke dalam PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Sistem patronik ini sangat berpengaruh karena biasanya jika keluarganya yang PDI maka keluarga yang lain juga ikut PDI. Jika ada teman atau tetangganya yang PDI maka teman atau tetangga yang lain juga ikut PDI.

#### c. Jenjang kaderisasi PDI Perjuangan

Setiap organisasi tentu pernah melakukan kaderisasi dalam organisasinya. Kaderisasi adalah proses penyiapan SDM agar mempunyai kelebihan dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat berperan dan berfungsi menjalankan organisasi secara lebih baik. DPC PDI Perjuangan

Kabupaten Klaten Berhasil dalam melakukan pengkaderan karena setiap kadernya telah mantap dalam berorganisasi, berprogram dan peningkatan kualitasnya SDM-nya semakin membaik. Di dalam PDI Perjuangan terdapat beberapa jenjang kaderisasi sebagai berikut :

1) Kader struktural

Kader struktural adalah kader PDI Perjuangan yang terlibat dalam struktur organisasi partai baik yang berada di DPP sampai ke anak ranting. Di Kabupaten Klaten sendiri untuk jumlah kader strukturalnya yaitu untuk pengurus anak ranting ada 5.509 orang, untuk pengurus ranting ada 3.609, untuk pengurus anak cabang ada 286 Orang dan untuk Dewan Pimpinan Cabang ada 19 Orang (Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten)

2) Kader fungsional

Kader fungsional adalah kader PDI Perjuangan yang terlibat dalam jabatan fungsional seperti kepala daerah atau anggota legislatif. Di Kabupaten Klaten sendiri untuk jumlah kader fungsionalnya yaitu ada 19 orang. 17 orang dari lembaga legislatif dan 2 orang dari eksekutif (Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten).

3) Kader Profesional

Kader profesional adalah kader PDI Perjuangan yang berasal dari asosiasi yang berafiliasi ke PDI Perjuangan. Di Kabupaten Klaten sendiri untuk jumlah kader professional tidak ada (Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten).

Sedangkan jika dilihat dari tingkatan kader (Dalam AD-ART partai PDI Perjuangan ketetapan kongres III Bali, 2010:34 ), kader PDI Perjuangan dapat diklarifikasikan dalam beberapa tingkatan yaitu :

1) Kader Pratama

Kader pratama adalah kader PDI Perjuangan yang terletak di tingkatan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Klaten sendiri untuk jumlah kader pada tingkatan kader pratama yaitu ada 26 orang (Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten)

2) Kader Madya

Kader madya adalah kader PDI Perjuangan yang terletak di tingkatan Provinsi. Di Kabupaten Klaten sendiri untuk jumlah kader pada tingkatan kader madya yaitu ada 4 orang (Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten)

3) Kader Utama

Kader utama adalah kader PDI Perjuangan yang terletak di tingkatan pusat atau nasional. Di Kabupaten Klaten sendiri untuk jumlah kader pada tingkatan kader utama yaitu ada 3 orang (Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten)

d. Keberhasilan Pengkaderan PDI Perjuangan Kabupaten Klaten

Keberhasilan PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dalam Proses pengkaderan dapat di lihat dari kemenangan PDI Perjuangan Kabupaten Klaten pada saat pilkada serentak yang telah diselenggarakan pada tahun 2015 yang lalu dengan mengantarkan kadernya sebagai bupati dan wakil



bupati terpilih secara sah melalui pemilu. Strategi PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik pada pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Klaten yang dijalankan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten ditujukan kepada semua kader dan masyarakat umum. Pendidikan politik yang ada di PDI Perjuangan terdiri atas tiga jenjang yaitu tingkat pratama, madya dan utama.

Materi yang di sampaikan dalam pendidikan politik kader yaitu meliputi beberapa materi wajib seperti materi tentang ideologi pancasila 1 juni 1945, 4 pilar kebangsaan dan materi pemilihan umum. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik bagi kader sangat besar dapat dirasakan dikarenakan proses pengkaderannya dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dalam bentuk langsung *live-in* (hidup) di tengah-tengah masyarakat. tujuannya adalah membentuk kader agar memahami persoalan dari masyarakat secara langsung sehingga dapat di carikan solusinya.

Tak hanya sebatas menerima dan mengimplemantasikan materi yang di dapat dari proses pengkaderan saja. Hal terpenting yang menjadi tujuan dari proses pengkaderan dapat dikatakan berhasil dan tidaknya pengkaderan itu sendiri dapat diketahui dari lulusnya kader yang ditentukan dari hasil laporan penelitian kader ketika berada dan berbaur di masyarakat. Laporan penelitian kader itu biasanya berbentuk seperti pembuatan makalah, tugas akhir dan lain-lain.

## **2. Metode Pengkaderan**

Metode pengkaderan merupakan cara-cara tertentu mengenai penyajian materi pengkaderan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyajian materi perkaderan sangat ditentukan oleh kemampuan kreatifitas dan kemampuan para narasumber dan pelatih atau instruktur dalam menerapkan metode perkaderan, sehingga mampu membantu para peserta dalam mencern materi yang disampaikan dalam perkaderan tersebut.

Dalam proses pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten melalui program sekolah partai tersebut dilaksanakan dengan metode tertentu. Setiap penyelenggaraan suatu program, metode yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Metode merupakan cara yang ditempuh untuk dapat menyelesaikan suatu urusan tertentu. Dalam pelaksanaan program pengkaderan politik di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, terdapat dua jenis metode yang digunakan yaitu metode kelas dan metode lapangan. Menurut Agus Arianto, dalam pelaksanaan setiap programnya, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten menggunakan metode kelas dan metode lapangan (wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 16 November 2016).

Adapun berbagai metode perkaderan yang dapat digunakan dan dikembangkan dalam pelatihan kader yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten diantaranya adalah :

a. Metode kelas

Metode kelas adalah metode pendidikan politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yang dilakukan dengan cara pemberian materi di dalam kelas atau ruangan. Contoh dari metode ini adalah seminar, dialog publik dan lain-lain.

Metode ini menurut penulis merupakan metode yang sangat baik. Dengan dilaksanakannya pengkaderan politik melalui metode kelas, kader akan memahami secara jelas materi pengkaderan politik dalam ranah teoritisnya. Selain itu dengan metode kelas, penyampaian materi pengkaderan politik yang bersifat teoritis akan lebih mudah untuk disampaikan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten melaksanakan metode kelas ini untuk kegiatan-kegiatan seminar dan diskusi. Menurut Hj. Kadarwati, SH, MH, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan metode kelas ini dengan cara rapat-rapat kordinasi, pelatihan-pelatihan dan pengkaderan (wawancara dengan wakil ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen, 03 Desember 2016). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat penulis analisis bahwa metode tersebut merupakan metode yang memfokuskan pada hal-hal yang berupa penyampain-penyampaian materi serta pemahamannya.

b. Metode lapangan

Metode lapangan adalah metode pengkaderan pendidikan politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yang dilakukan dengan cara terjun langsung

ditengah-tengah masyarakat. Contoh dari metode ini adalah kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan dan kegiatan bakti sosial.

Metode lapangan merupakan metode yang digunakan dengan cara berpraktek secara langsung di lapangan yang memfokuskan kegiatan dengan berbaur dan bekerja bersama dengan masyarakat. Dari metode lapangan ini setiap kader akan lebih mudah menggali ilmu yang begitu luas dikarenakan setiap kader dapat berinteraksi secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat dan juga dapat melakukan kerja-kerja sosialnya seperti melakukan kerja bakti, gorong royong dan lain sebagainya. Jadi menurut penulis, metode pengkaderan ini dijalankan secara baik, tepat dan benar maka akan sangat berdampak positif bagi peningkatan kemampuan dan pengetahuan kader. Kader akan jauh lebih memahami materi-materi yang telah disampaikan di kelas dengan cara berpraktek langsung di lapangan. Berikut wawancara penulis dengan Agus Arianto selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengatakan bahwa :

“metode lapangan ini merupakan wadah untuk menjalankan fungsi pengkaderan politik, dari sinilah kita mencoba berpraktek menjalankan fungsi kader dari partai. Artinya, menyerap aspirasi masyarakat yang ada dan bersama masyarakat itu kemudian bagaimana bisa menggagregasi aspirasi tersebut. Jadi pada tingkatan itu mencoba untuk mempraktekan fungsi partai (wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 16 November 2016)”

Jadi dari pernyataan tersebut dapat penulis analisis bahwa metode lapangan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pengkaderan politik di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Ini merupakan salah satu

inovasi yang diunggulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten adalah metode lapangan ini.

Metode pengkaderan politik yang digunakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten pada dasarnya adalah baik. Dengan cara mengkombinasikan antara teori dan praktek dalam metodenya menjadikan kader akan lebih mudah untuk menyerap dan mendapatkan ilmu pendidikan politik yang dibutuhkan. Metode kombinasi kelas dan lapangan tersebut apabila dilaksanakan dengan baik tentu akan berdampak baik terhadap keberhasilan pelaksanaan proses pengkaderan politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.

### **3. Materi Pengkaderan**

Tingkat kesesuaian materi pengkaderan yang diberikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dapat diukur dengan berpedoman kepada UU dan fungsi PDI Perjuangan yang tercantum di dalam konstitusinya. Di dalam UU dijelaskan bahwa materi pengkaderan politik itu mencakup hal-hal seperti pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam konstitusi PDI Perjuangan sendiri bahwa fungsi PDI Perjuangan adalah untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pengurus

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, penulis menyimpulkan bahwa ada tiga materi pengkaderan politik yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yaitu :

1) Ideologi Pancasila 1 Juni 1945

Ideologi pancasila 1 Juni adalah ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan. Ideologi ini diambil dari pidato Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kandungan dari pidato Soekarno tersebut merupakan landasan pancasila yang dianut oleh PDI Perjuangan. Ideologi ini terkadang juga disebut sebagai Marhaenisme. Ideologi marhaenisme memiliki keterikatan yang sangat erat dengan pancasila dimana intisari dari ideologi marhaenisme yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang berkerakyatan yang terpancar dalam pengamalan sila-sila dari pada pancasila. Secara subjektif ideologi marhaenisme dan pancasila sama-sama dicetuskan oleh soekarno sehingga pemikiran yang ada pada keduanya tentu saja tidak saling bertentangan satu sama lain.

Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan marhaenisme dicetuskan pada tahun 1927 oleh bung karno sendiri. Perbedaannya hanya pada persoalan ideologi marhaenisme yang dicetuskan pada tahun 1927 sebagai ideologi dan teori perjuangan, sedangkan pancasila dilahirkan sebagai dasar Negara. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam marhaenisme seperti anti kolonialisme, anti feodalisme, asas nasionalisme, demokrasi, keadilan sosial dan lain-lain yang secara substansi sama dengan pancasila. PDI

Perjuangan menggunakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi partai karena mengingat nilai historisnya. Berikut ini rumusan Pancasila 1 Juni 1945 :

- a. Kebangsaan Indonesia
- b. Internasionalisme atau perikemanusiaan mufakat, perwakilan, permusyawaratan atau demokrasi
- c. Kesejahteraan, keadilan sosial (*sociale recht vaardigheid*)
- d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bagi PDI Perjuangan, Pancasila 1 Juni 1945 merupakan semangat dan jiwa, serta prinsip dari Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Berikut ini beberapa arti penting Pancasila 1 Juni 1945 bagi PDI Perjuangan :

- a. Pancasila 1 Juni 1945 merupakan harapan tentang masa depan bangsa, sumber harapan dalam menjawab tantangan nyata rakyat.
- b. Pancasila 1 Juni 1945 merupakan member arah pada kebijakan dan seluruh pergerakan partai, baik dalam pengorganisasian rakyat maupun dalam mengelola kekuasaan Negara.
- c. Pancasila 1 Juni 1945 merupakan pengatur perilaku dan alat penilai perilaku, serta bagi etika dan disiplin partai, yang berlaku seluruh elemen partai.
- d. Pancasila 1 Juni 1945 merupakan menjadi pembentuk kultur partai, yang berdasarkan nilai-nilai atau keutamaan Pancasila.

Kongres III PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Bali mengamanatkan agar PDI Perjuangan untuk kembali ke jalan ideologi. Hal ini dilakukan karena kemerosotan dan kekalahan PDI Perjuangan pada pemilu 2004 dan 2009 yang disebabkan oleh seluruh kekuatan PDI Perjuangan terjebak pada pragmatism dan oportunisme, yang kemudian dalam prakteknya masuk dalam proses transaksional material. Selanjutnya pada kongres III itu PDI Perjuangan diingatkan dengan kenangan bahwa pada pemilu tahun 1999 mereka berhasil memenangkan pemilu. Hal ini kemudian menjadi landasan bagi PDI Perjuangan untuk merekomendasikan pada kongres III tersebut. Dimana PDI Perjuangan direkomendasikan untuk kembali ke jalan ideologi pancasila 1 Juni 1945, yaitu ketika Bung Karno menyampaikan pidato di depan sidang BPUPKI, bukan pancasilanya Orde Baru yang tidak ada penjelasan historis apapun soal itu (Dalam skripsi Zulpandi, 2014:88).

Dari penjelasan diatas penulis menganalisis bahwa pentingnya ideologi pancasila 1 Juni 1945 itu bagi PDI Perjuangan. Materi pengkaderan tersebut sangat penting mereka sampaikan karena merupakan salah satu rekomendasi hasil kongres yang merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi di partai berlambang kepala banteng ini. Secara kepentingan partai, materi ini sangat penting untuk disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten kepada kadernya. Dalam pengamatan penulis pada waktu penelitian terhadap beberapa respon kader mengenai pemberian materi ideologi 1 Juni 1945 banyak yang menganggap penting untuk diketahui karena sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan. Dengan alasan yang disebutkan diatas tentu



pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten akan berupaya sekuat tenaga untuk menanamkan materi ini kepada para kadernya. Hasil dari pemberian materi tersebut, dapat penulis simpulkan baik karena semua kader yang tidak tau akan menjadi tau tentang arah perjuangan partai.

## 2) Empat Pilar Kebangsaan

Empat pilar kebangsaan juga merupakan salah satu materi pengkaderan politik yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Gagasan untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ini dikemukakan oleh Taufik Kiemas. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut tidak bermaksud bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan persyaratan minimal bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Empat pilar kebangsaan merupakan materi pengkaderan yang baik untuk disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Materi ini merupakan materi yang dibutuhkan untuk menambah kedewasaan bernegara, berbangsa dan berpolitik masyarakat. Dalam pengamatan penulis ketika

melakukan penelitian terhadap beberapa respon kader mengenai pemberian materi empat pilar kebangsaan banyak yang menganggap penting untuk diketahui karena menurut analisis penulis, materi ini sudah memenuhi kriteria dalam melakukan pengkaderan karena telah sesuai dengan apa yang diamanatkan UU. Hasil dari pemberian materi tersebut, dapat penulis simpulkan baik karena materi empat pilar kebangsaan itu merupakan produk hukum maka semua kader partai harus mentaati itu.

### 3) Pemilihan Umum (Pemilu)

Materi pemilu merupakan materi pengkaderan yang penting untuk disampaikan oleh setiap partai politik. PDI Perjuangan juga tidak ketinggalan dalam memberikan materi politik dalam urusan pemilu. Tingginya tingkat kompetisi partai politik dalam setiap pemilu memicu partai politik berlomba untuk memberikan pemahaman materi pemilu kepada kadernya.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten menganggap materi pemilu sangat penting untuk dikuasai oleh setiap kadernya. Penyampain materi pemilu dilakukan dengan berbagai cara agar setiap kadernya dapat menyampaikan materi-materi itu kepada masyarakat. Ada melalui seminar ada melalui dialog door to door dengan masyarakat. Hal ini dilakukan karena mengingat pentingnya pemilu bagi PDI Perjuangan. Utama materi pemilu ini lebih sering disampaikan kepada pemilih pemula. Dengan harapannya, selain masyarakat paham arti penting pemilu, partai juga bisa mengarahkan pemilih pemula tersebut ke pilihan politiknya.

Pemilu merupakan materi populer yang disampaikan partai politik kepada masyarakat saat ini. Pemilu adalah salah satu tujuan dari partai politik. Kompetisi yang ada di dalam membuat persaingan penyampaian materi pemilu juga terjadi. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten sebagai peserta pada pileg 2014 dan Pemilukada 2015 juga menganggap bahwa materi pemilu merupakan materi penting untuk disampaikan kepada kader dan masyarakat. Kesuksesan penyampaian materi pemilu ini akan berdampak kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu ini akan menjadi sasaran bagi partai politik, terutama partisipasi untuk mendukung partai politiknya. Dalam pengamatan penulis ketika melakukan penelitian terhadap beberapa respon kader mengenai pemberian materi pemilihan umum banyak yang menganggap penting untuk diketahui karena menurut penulis, materi ini adalah kunci dari keberhasilan sebuah partai politik untuk beradu menerapkan strategi politik pada saat pemilu diadakan. Dari penjelasan di atas penulis menganalisis bahwa pemberian materi pemilu ini sangat efektif dan berhasil sesuai fakta di lapangan dimana pada pileg 2014 PDI Perjuangan mampu keluar sebagai partai pemenang yang meraih total kursi terbanyak yaitu 17 kursi dan pada pemilukada 2015 mengantarkan kadernya menjadi bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Klaten. Hasil dari pemberian materi tersebut, dapat penulis simpulkan baik karena materi pemilihan umum ini merupakan senjata yang sangat diandalkan dalam pertarungan memenangkan pemilu memperebutkan kekuasaan.

Dari ketiga materi yang telah dijelaskan diatas salah satu materi yang kemungkinan besar nantinya wajib dan harus dimasukkan kedalam setiap proses pengkaderan atau pendidikan politik di DPC PDI Perjuangan kabupaten Klaten yaitu materi pengkaderan tentang anti korupsi. Materi anti korupsi penting untuk diberikan kepada semua kader PDI Perjuangan sebab dengan adanya materi anti korupsi setidaknya tidak akan lagi ada kejadian korupsi yang akan terjadi di setiap kader PDI Perjuangan (terkhusus kader PDI Perjuangan Kabupaten Klaten) yang pada saat setelah penulis menyelesaikan penyusunan penelitian ini terdengar kabar salah satu kader terbaik PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten yang terjerat kasus korupsi. Padahal kader tersebut mempunyai trenk and rekor prestasi yang cukup membanggakan PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa hal yang menjadi perhatian besar oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten kedepanya yaitu memberikan penjelasan-penjelasan serta pemahaman tentang materi anti korupsi. Diharapkan dengan adanya materi tentang anti korupsi yang di berikan kepada setiap kader PDI Perjuangan maka akan terjaga tidak adanya korupsi lagi yang dilakukan setiap kader PDI Perjuangan (terkhusus Kader PDI Perjuangan Kabupaten Klaten).

#### **4. Jadwal Perkaderan**

Setiap suatu kegiatan yang ingin di adakan tentunya mempunyai peraturan yang telah disusun rapih. sebagaimana untuk menentukan berjalanya pola secara

teratur sesuai dengan apa yang telah dibuat maka pembagian waktu harus benar di perhatikan. Pelaksanaan Pengkaderan sendiri dalam penggunaan waktu secara efektif dan efisien pasti akan berdampak baik terhadap pelaksanaan pengkaderan tersebut.

Menejemen waktu atau penjadwalan yang dilakukan sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka perkaderan yang ada harus dilakukan secara benar dan tepat. Menurut Sutarjo di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten jadwal perkaderannya itu dilakukan perperiode dan tidak ada jadwal waktu yang pasti untuk ditetapkan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten sebagai pelaksana dari kegiatan perkaderan dilakukan secara simultan sewaktu-waktu, dan terus-menerus. Kalo tidak dikelas dilapangan juga boleh karena itu juga sudah termaksud sekolah partai (wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 14 November 2016).

Dari pernyataan diatas dapat penulis analisis bahwa untuk jadwal perkaderan terlaksana secara sewaktu-waktu dan jadwalnya tidak menentu artinya tak ada jadwal yang di tetapkan secara baku. Sedangkan untuk pelaksanaan perkaderannya itu terjadi dan dilakukan di dalam kelas untuk penerimaan teori dan dilapangan untuk penerapan teori artinya tentu teori dan praktek merupakan cara pembelajaran yang baik karena tak hanya tau akan materinya saja akan tetapi mencoba untuk melakukannya sesuai dengan materi yang telah dipelajari.

## 5. Narasumber

Sebagai pemberi materi seorang narasumber harus mempunyai kemampuan dalam hal kecakapan berbicara, berargumen serta mempunyai pengetahuan yang lebih dari para peserta yang ada. Untuk menjadi seorang narasumber dalam kegiatan pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tidak hanya diambil dari kalangan internal partai saja, akan tetapi bisa juga memanggil narasumber dari luar partai. Berikut wawancara penulis dengan Agus Arianto selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengungkapkan bahwa :

“kalo yang dari partai, itu paling gak dia sudah megalami TOT (Training Of Trainer) misalkan saya pengen jadi trainer, saya mesti sudah melalui TOT dulu, jadi ngak mungkin sini ngasih trainer di PDI Perjuangan, tapi dia belum mengalami training ya ngak mungkin. Makanya alurnya itu kalo di sekolah partai dia menerima itu, ya harus ditularkan kepada struktural dibawahnya atau kepada anggota-anggotanya tapi dia sudah tau, memang dia sudah di TOT. kalo belum gimana mau ngomong kalo belum di TOT, pasti ngak bisa. Karna kita harus baku. Harus sama. Sedangankan untuk narasumber yang diluar partai biasanya kita mengundang personil atau dosen untuk member materi seperti kornelis ley dari UGM, sri adi ningseh yang dari UGM, tentang sejarah kita undang sri asri warman, kemudian masalah partai kita undang sidarta danuarta yang dulu pengawalnya bung karno, dan lain-lain (Wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 16 november 2016)”

Jadi, dari pemaparan yang disampaikan oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tersebut dapat di analisis bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dalam hal pemberian materi pada pengkaderan untuk narasumber yang berasal dari dalam internal partai ditegaskan bahwa narasumber tersebut harus pernah mengalami di TOT (training Of Trainer) persyaratan

tersebut mengisyaratkan agar pengkaderan dilakukan mengikuti alur dan pengkaderan juga yang pernah dialami dapat disampaikan kembali kepada para anggota kader. Selanjutnya untuk narasumber diluar partai seperti mengundang para dosen dan beberapa ahli dibidangnya untuk memberikan materi perkaderan hal ini dilakukan agar menambah pengetahuan bagi para peserta kader.

## **6. Evaluasi dalam Perkaderan**

Evaluasi perkaderan biasa dilakukan sebagai bentuk pengamatan dan penilaian yang secara sadar dan terencana terhadap proses pengkaderan sebagai usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Evaluasi tentunya mempunyai tujuan yaitu menilai apakah pendidikan dan pelatihan dalam perkaderan yang telah dilaksanakan tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemngkaderan akan dianggap “berhasil” apabila diklat perkaderan yang telah dilaksanakan dinilai telah mencapai hasil yang diinginkan.

Evaluasi dalam diklat pengkaderan mempunyai maksud sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang mendekati kebenaran dari hasil pendidikan dan latihan yang dilaksanakan dengan menggunakan pengukuran tertentu. Evaluasi perlu dilakukan oleh dan terhadap setiap orang yang ada hubungannya dengan proses perkaderan. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap peserta tetapi juga dilakukan terhadap berbagai aspek yang mempunyai hubungan dan pengaruh atas perbaikan kualitas peserta, seperti : peran narasumber, metode yang digunakan,

materi yang disampaikan kesemuanya merupakan faktor pendukung dalam rangka menuju keberhasilan sebuah pengkaderan.

Di dalam DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten menganggap bahwa evaluasi dalam pengkaderan tentu sangat perlu dilakukan berhubung untuk mengkroscek seluruh kegiatan pengkaderan yang telah dilaksanakan. Arah evaluasi dalam perkaderan adalah demi perbaikan dan penyempurnaan pada proses pengkaderan, berikut wawancara penulis dengan Sutarjo selaku wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Evaluasi ada. Jadi kalo di partai itu ada beberapa langka. Pertama pemetaan kader, kemudian penempatan kader. Jadi ow.. ini punya kualifikasi calonkan jadi DPR, DPRD. Ow...ini masukan kualifikasi jadi calon bupati. Makanya sebelum jadi calon-calon bupati, calon gubernur. Kader PDI Perjuangan di sekolahkan dulu. Karna neng partai itu kita dapat kader misalkan dari 50 orang trus sisanya dapat 10 orang yang militant itu sudah luar biasa. Ini seleksi alam artinya dari 50 puluh orang kader kita tidak bisa berharap semuanya akan jadi kader. Akhirnya ya evaluasi mengevaluasi diri sendiri juga. Akhire mrotoli dewe (wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 14 November 2016)”

Jadi, dari pemaparan yang disampaikan oleh wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten tersebut dapat di analisis bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dalam melakukan evaluasi pengkaderan dapat dilihat seberapa jauh ketahaan daya tahan para kader untuk dapat mengikuti tahapan-tahapan proses pengkaderan. Seleksi alam tentunya akan mengugurkan satu persatu peserta kader dan juga seleksi alam sangat berpengaruh untuk mengevaluasi diri sendiri dalam pelaksanaan evaluasi pengkaderan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.



Selain itu, dapat dilihat dari beberapa aspek penting pelaksanaan evaluasi pengkaderan yaitu mengenai perkembangan jumlah kader dan perkembangan kualitas kader itu sendiri.

a. Perkembangan Jumlah kader

Setiap pelaksanaan perkaderan akan dapat diketahui seberapa banyak perkembangan jumlah kader yang terlibat dalam proses pengkaderan tersebut. Perkembangan jumlah kader ini menentukan kader dalam satu periode kurun waktu tertentu. Berikut perkembangan jumlah kader yang terdidik di PDI Perjuangan Kabupaten Klaten :

**Tabel. VIII**  
**Jumlah Kader Terdidik PDI Perjuangan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015**

No	Kader Belum Terdidik	Kader Sudah Terdidik			Jumlah Orang
		Pratama	Madya	Utama	
1	253	26	4	3	33
		-	-	-	253
2	Jumlah Kader				286

Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten

Dari table diatas dapat dilihat bahwa di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten mempunyai kader sebanyak 286 orang, yang belum terdidik ada 253 orang dan sesuai dengan tingkatan jenjang perkaderannya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten telah memiliki kader sudah terdidik dalam tingkatan kader pratama sebanyak 26 Orang, untuk tingkatan madya sebanyak 4 orang, tingkatan utama sebanyak 3 orang dan keseluruhan jumlah kader yang terdidik ada 33 orang. Semua jumlah kader yang terdidik tersebut adalah

penggerak dan masuk kedalam struktur partai. Kader yang masuk kedalam struktur partai adalah kader yang pernah di sekolahkan partai. Jadi dapat penulis analisis bahwa dengan jumlah data kader segitu sebagai motor penggerak organisasi khususnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten sudah cukup baik. Kader yang tergabung dalam struktur partai wajib mengikuti sekolah partai karena untuk menjadi penggerak harus lebih bisa dan melebihi dalam berbagai hal dari kader yang berada di luar struktur partai.

#### b. Perkembangan Kualitas Kader

Peran sumber daya manusia dalam partai politik akan berpengaruh terhadap keberhasilan partai politik. Dengan sumber daya manusia yang baik partai politik akan mampu untuk menjalankan program partai dengan hasil yang baik juga tentunya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan militan adalah kebutuhan pokok partai politik yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik. Pemenuhan sumber daya manusia partai politik sangat berkaitan erat dengan proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Semakin baik proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan, semakin baik juga sumberdaya manusia yang dimiliki oleh partai politik.

Menurut Sutarjo selaku wakil ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Klaten menuturkan bahwa untuk perkembangan Kualitas kader pada setiap tahunnya PDI Perjuangan sangat meningkat. Hal tersebut dapat diukur dari persepsi orang. Dahulu orang mengatakan kalo PDI Perjuangan itu partainya orang-orang bodoh. Sekarang bisa dilihat di talkshow di TV, Presiden dan

Gubernur Jawa Tengah aja dari PDI Perjuangan (wawancara dengan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 14 November 2016). Dari pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa proses perkaderan tentunya sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan perkembangan kualitas kader yang dimana mengalami perbaikan secara bertahap dari waktu ke waktu terbukti dengan terbantahnya persepsi orang banyak bahwa PDI Perjuangan sekarang jauh lebih baik dan kualitas kadernya sangat terdidik. Pernyataan penulis tersebut dapat di pertegas oleh Agus Arianto selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Beliau mengungkapkan Bahwa :

“karna militansinya. Karna di PDI Perjuangan sangat taat sama ketua umum dan ketua umum itu tidak keluar dari garis partai, pasti selalu on the track. Sehingga anak buahnya takut artinya Ibu Mega sangat berwibawa di lihat kader-kadernya (wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 16 November 2016)”

Jadi dapat di analisis bahwa hal yang mempengaruhi peningkatan kualitas kader yang semakin membaik tersebut tidak luput dari ketegasan aktor sosok pemimpin yang tentunya selalu berpang teguh pada dasar-dasar, ideologi dan tujuan partai.

Di Kabupaten Klaten sendiri untuk peningkatan kualitas kader dalam pengamatan penulis dapat dikatakan hasil dari pengkaderan semakin baik dari waktu ke waktu sebab jika melihat hasil dari pilihan legislatif pada tahun ke tahun DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten mampu mengantarkan kader-kadernya untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Klaten terbanyak Seperti pada tahun 2004 jumlah kursi yang diperoleh kader PDI Perjuangan sebanyak

18 kursi dari 45 kursi yang ada. Pada tahun 2009 jumlah kursi yang diperoleh kader PDI Perjuangan sebanyak 15 kursi dari 50 kursi yang ada. Pada tahun 2014 jumlah kursi yang diperoleh kader PDI Perjuangan sebanyak 17 kursi dari 50 kursi yang ada. Dan tak hanya itu, pada pemilihan bupati pada tahun 2010 yang telah diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten mampu mengantarkan kadernya menjadi bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2015, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Kembali mengulang kesuksesannya dengan mengantarkan kadernya menjadi pemenang untuk bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten Klaten dalam jangka waktu periode lima tahun ke depan.

Dari penjelasan di atas dapat penulis analisis bahwa proses pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dapat dikatakan berhasil dilakukan. Artinya bahwa penciptaan kader untuk mantap dalam berorganisasi, berprogram dan peningkatan kualitas SDM semakin membaik karena jika penulis amati mulai dari lembaga legislatif maupun eksekutif merupakan kader dari PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yang dapat dikatakan sangat terdidik dan kualitasnya sangat meningkat dari waktu ke waktu.